

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Elsyte et al., (2016:2) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada Pemerintah Daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, tentunya akan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan

penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Belanja langsung digunakan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan dan program yang dituangkan dalam peraturan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja pemerintah. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah melalui alokasi belanjanya. Alokasi belanja yang baik tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Penyelenggara pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah. Penyertaan modal daerah yang berupa uang yang dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan peraturan atau keputusan walikota.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur perekonomian suatu daerah. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi.

Menurut Sukirno, (2011:9) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Secara umum pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan

kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Muhibban & Basri, 2017).

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu Negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan nilai tambah keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB menggambarkan tingkat keadaan perekonomian suatu daerah baik yang dilakukan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah dalam suatu periode tertentu. Kinerja setiap perekonomian daerah dapat diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat diperlukan dan harus diusahakan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, mewujudkan pemerataan pembagian pendapatan dan kekayaan, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan peluang lebih besar untuk perluasan kesempatan kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rizky et al., 2016) memperoleh hasil bahwa penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan belanja modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Abdur & Amirya, (2016) memperoleh hasil yang berbeda bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sementara variabel penyertaan modal daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Tempone et al., 2020) memperoleh hasil bahwa secara simultan belanja langsung dan belanja tidak langsung memiliki pengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, belanja langsung tidak berpengaruh berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Dauhan et al., 2020) memperoleh hasil bahwa pengelolaan belanja tidak langsung dan belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan hasil penelitian yang berbeda dari beberapa peneliti terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2020”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah penting yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2020?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2020?
3. Bagaimana pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah 2018-2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan tesis ini dibuat untuk mengetahui pentingnya peran belanja langsung, belanja tidak langsung dan penyertaan modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi disuatu daerah.

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2020.
2. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2020.
3. Untuk menganalisis pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah 2018-2020

### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian yang relevan atau referensi bagi para peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian dan juga menambah wawasan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah serta pertumbuhan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian diharapkan menjadi kontribusi bagi pemerintah agar dapat mengimplementasikan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam suatu sistem yang

terintegrasi sehingga keuangan daerah dapat dikelola secara tertib sesuai peraturan perundang-undangan, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.